

Nama : Lubis Hermanto
NIM : 55210120039
Judul : KOMUNIKASI POLITIK ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) RI (Studi Kasus
Mediasi Penanganan Konflik Pertambangan Di Kabupaten Bima)
Isi Tesis : Iii + 172 hlm, bibliografi : 33 buku, 1 jurnal.

ABSTRACT

This research reviews the political communication of the members of the NTB provincial parliament as conflict mediators in the mining dispute at Bima district, involving the Bima regency government, private industry and the community.

The theoretical basis of this study is a theory of mediation. The paradigm in this research is a constructivist paradigm as a way of seeing the research object, using a qualitative approach to explore the in-depth findings, through a case study method. Primary data were obtained from in-depth interviews with key personnel and secondary data were obtained through the study of documents. Data were analyzed qualitatively using an interactive model of data reduction, data display, and conclusion drawing and verification.

The results of research that the model of political communication senator NTB provincial representatives in mediating conflicts in Kabupaten Bima was only one direction (bottom up). Model of Political communication was used two is communication face to face with the Government (through media) and direct communication (face to face) to public negotiations. Communication was done sharp (in the community) and blunt (in the Government). The mediator can not facilitate mediation the members of conflict in one room. So, the process of political communication does not find solutions and one commitment. Each of member of conflict to tend of their opini. In Additionally, its so many political issues (rumors) while mediators come to facilitate of them, is "miscommunication" and "misperceptions". Consolidation as a way to mediation does not being a good solution. The new problem happended like a "street legal" is a part of anakisme, blocking ports, burned of sub-district and Regent of Bima office, making a situation more unclear.

Key words : Political Communication, Mediation, Case Study.

Nama : Lubis Hermanto
NIM : 55210120039
Judul : KOMUNIKASI POLITIK ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) RI (Studi Kasus
Mediasi Penanganan Konflik Pertambangan Di Kabupaten Bima)
Isi Tesis : Iii + 172 hlm, bibliografi : 33 buku, 1 jurnal.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji komunikasi politik yang dilakukan oleh Anggota DPD RI perwakilan Propinsi NTB sebagai mediator konflik pertambangan yang terjadi Di Kabupaten Bima, yang melibatkan pihak Pemerintah Kabupaten Bima, swasta, dan masyarakat. Tujuan penelitian mencari tahu komunikasi dan model komunikasi politik dalam proses mediasi yang dilakukan oleh Anggota DPD RI perwakilan Propinsi NTB.

Landasan teoritik dari penelitian adalah teori mediasi. Paradigma dalam penelitian adalah paradigma konstruktivis, menggunakan pendekatan kualitatif, melalui metode studi kasus untuk mencari kekhususannya. Data primer diperoleh dari informan kunci melalui wawancara mendalam dan observasi berperan serta, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi dokumen. Data dianalisis secara kualitatif menggunakan model interaktif yaitu mereduksi data, display data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa model komunikasi politik Anggota DPD RI perwakilan Propinsi NTB dalam memediasi konflik pertambangan di Kabuapten Bima hanya bersifat satu arah yaitu dari bawah ke atas (*bottom up*). Model komunikasi politik yang digunakan ada dua yaitu komunikasi secara tatap muka (*face to face*) kepada pihak Pemerintah (namun cenderung melalui media) dan komunikasi tatap muka secara langsung (*face to face*) kepada masyarakat dalam ranah negosiasi. Komunikasi yang dilakukan cenderung tajam (pihak masyarakat) dan tumpul (pihak Pemerintah). Mediator tidak mampu mempertemukan pihak-pihak dalam lingkup ruang mediasi. Sehingga proses komunikasi politik tidak menghasilkan solusi dan titik temu. Pihak-pihak yang bertikai cenderung mempertahankan pendapat masing-masing. Tambahan lagi banyaknya isu-isu politik yang berkembang dengan hadirnya mediator yang akhirnya makin menimbulkan *miscomunikasi* dan *mispersepsi*. Konsolidasi sebagai jalan mediasi menyelesaikan masalah tidak menjadi solusi. Masalah baru tindakan “hukum jalanan” yaitu anakisme, pemblokiran pelabuhan, pembakaran kantor camat, dan kantor Bupati Kabupaten Bima, malah semakin memperkeruh suasana.

Kata Kunci : Komunikasi Politik, Mediasi, Studi Kasus.